

**FAKTOR IDIOSINKRATIK PM SCOTT MORRISON DALAM
KEBIJAKAN PENANGANAN PENCARI SUKA DI AUSTRALIA**

Skripsi

Oleh

**NI LUH SAVITRI RAHAJENG
NPM 1616071018**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**FAKTOR IDIOSINKRATIK PM SCOTT MORRISON
DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN
PENCARI SUAKA DI AUSTRALIA**

Oleh

NI LUH SAVITRI RAHAJENG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FAKTOR IDIOSINKRATIK PM SCOTT MORRISON DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PENCARI SUKA DI AUSTRALIA

Oleh

Ni Luh Savitri Rahajeng

Australia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 memiliki kewajiban kemanusiaan untuk melindungi hak asasi manusia para pencari suaka. Namun, pada masa pemerintahan PM Scott Morrison (2018-2022), kebijakan penanganan kedatangan pencari suaka menjadi lebih ketat dengan melibatkan militer melalui *Operation Sovereign Borders* (OSB) untuk mengawasi dan mencegah kedatangan perahu pencari suaka. Scott Morrison menggunakan pendekatan *zero tolerance*, yakni pendekatan yang secara tegas menolak kedatangan pencari suaka tanpa mempertimbangkan keadaan khusus mereka. Dalam hal ini, keputusan Scott Morrison dapat terkait dengan faktor-faktor idiosinkratik yang mempengaruhinya sebagai pemimpin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedatangan pencari suaka sebagai salah satu masalah di Australia, serta menganalisis faktor-faktor idiosinkratik PM Scott Morrison yang mempengaruhi kebijakannya dalam penanganan pencari suaka di Australia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menginterpretasikan fenomena sosial dengan mempertimbangkan pemahaman, kepercayaan, dan pengalaman subjektif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan Miles, Huberman dan Saldana, yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian ini menggunakan data dari buku biografi serta laporan resmi pemerintah dan *Refugee Council of Australia*.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor idiosinkratik Scott Morrison berdampak pada dua hal, yakni pandangan dan keputusannya. Faktor Pengalaman Awal, Peran Mentor, dan Karakter Kepemimpinan berdampak pada bagaimana ia membuat keputusan, sementara faktor Keyakinan Agama, Identitas Lokal, dan Inspirasi dari Pemimpin Negara Lain mempengaruhi pandangannya terhadap pencari suaka.

Kata kunci: pencari suaka, Scott Morrison, *zero tolerance*, faktor idiosinkratik.

ABSTRACT

IDIOSYNCRATIC FACTORS IN PM SCOTT MORRISON'S APPROACH TO DEALING WITH ASYLUM SEEKERS IN AUSTRALIA

By

Ni luh Savitri Rahajeng

Australia, as a country that has ratified the 1951 Refugee Convention, has a humanitarian obligation to protect the human rights of asylum seekers. However, during the tenure of PM Scott Morrison (2018-2022), the policy regarding the handling of asylum seeker arrivals became stricter, involving the military through Operation Sovereign Borders (OSB) to monitor and prevent the arrival of asylum seeker boats. Scott Morrison adopted a zero tolerance approach, which unequivocally rejected the arrival of asylum seekers without considering their specific circumstances. In this case, Scott Morrison's decision may be related to idiosyncratic factors that influenced him as a leader. This research aims to describe the arrival of asylum seekers as one of the issues in Australia, as well as to analyze the idiosyncratic factors of PM Scott Morrison that influenced his policies in handling asylum seekers in Australia. This study adopts a qualitative approach that interprets social phenomena by considering subjective understanding, beliefs, and experiences. Data analysis in this research follows the techniques proposed by Miles, Huberman, and Saldana, which include data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The study utilizes data from biographical books as well as official government reports and the Refugee Council of Australia. The main findings of this research indicate that Scott Morrison's idiosyncratic factors impact two aspects: his perspectives and decisions. Factors such as Early Experience, Mentorship, and Leadership Character influence how he makes decisions, while factors like Religious Beliefs, Local Identity, and Inspiration from Other National Leaders affect his perspectives on asylum seekers.

Keywords: asylum seekers, Scott Morrison, zero tolerance, idiosyncratic factors.

Judul Skripsi

**: FAKTOR IDIOSINKRATIK PM SCOTT
MORRISON DALAM KEBIJAKAN
PENANGANAN PENCARI SUAKA DI
AUSTRALIA**

Nama Mahasiswa

: Ni Luh Savitri Rahajeng

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616071018

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020

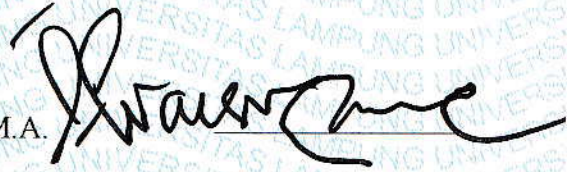
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



Penguji
Bukan Pembimbing : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurchaida, M.Si.

NIP. 1961087 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Ni Luh Savitri Rahajeng
1616071018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Niluh Savitri Rahajeng, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juli 1998 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Bapak I Wayan Wisanta dan Ibu Ni Made Nurhayati. Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak TK Xaverius 2 Bandar Lampung tahun 2002, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Xaverius 3 Bandar Lampung tahun 2004 dan Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswi di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswi Hubungan Internasional di Universitas Lampung, penulis telah mengikuti berbagai kegiatan non-akademik. Penulis berpartisipasi sebagai *volunteer* AIESEC Unila pada *winter project* tahun 2016 dan *summer project* tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) dan *volunteer* di berbagai kegiatan di tingkat fakultas, seperti *State and Digital Society IICS 2018 Conference*. Penulis juga menjalani magang pada tahun 2019 di LKBN Antara dan telah mewartakan beberapa berita untuk tingkat lokal maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Faktor Idiosinkratik PM Scott Morrison dalam Kebijakan Penanganan Pencari Suaka di Australia” adalah salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku dekan Fisip Unila;
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
3. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing utama atas kesediaannya memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing pendamping atas kesediaannya memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih atas saran-saran perbaikannya pada seminar dan ujian skripsi;
6. Staf jurusan Hubungan Internasional atas bantuannya dalam proses administrasi skripsi;
7. Kedua orang tuaku, belahan jiwaku, Ibu dan Bapak yang cintanya tidak pernah putus bahkan di saat aku terpuruk dan hampir menyerah. Doa ibu dan bapak-lah yang membuatku kuat menjalani lika-liku perkuliahan, hingga akhirnya berhasil menyelesaikan studi ini. Mohon maaf, dan terima kasih telah sabar menunggu, Bu, Pak. Terima kasih atas segalanya.

Semoga Sri Radha Giridhari selalu memberikan karunia-Nya kepada ibu dan bapak;

8. Nenekku tercinta, yang menjadi saksi perjalanan hidupku sejak awal. Terima kasih atas dukungannya yang tulus;
9. Suamiku, Kadek Ray Sulyantha, M.A., yang selalu setia mendampingi dari jauh. Terima kasih telah mempercayaku dalam melewati proses yang panjang ini, meyakinkanku untuk bangkit, dan mewarnai hari-hariku dengan kalimat-kalimat positif. Semoga kita selalu bisa saling menguatkan selamanya.
10. Sahabatku Dwi dan Rika yang telah kebersamai sejak 2016 dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi tempatku menuangkan isi hati dan pikiran selama ini. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, selalu menenangkan dan menguatkan. *Your understanding and empathy have made me stronger.* Semoga persahabatan kita langgeng selamanya.
11. Sahabat “Sukses Dunia Akhirat”, Citra, Rona, Suci, Coco, Nabillah, atas kebersamaannya melewati proses pengerjaan skripsi. Tidak terhitung seberapa banyak percakapan kita yang telah menghibur dan menyemangati. Terima kasih atas bantuan dan *support*-nya yang tulus. Sesuai nama grup ini, semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
12. Teman-teman seperjuangan, Ulfa, Anton, Tifu, Bagus, Endah, Yayang, terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
13. Sahabat SMP dan SMA yang masih setia bersamaku, Farel, Agnes, dan Vina. Terima kasih atas dukungan moralnya selama ini. Walaupun telah sibuk masing-masing, mari kita lewati masa depan bersama sebagai sahabat yang saling mendukung.
14. Sahabatku dr. Mona atas kebaikannya yang luar biasa.
15. Serta semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Konseptual.....	13
<u>2.2.1</u> Pencari Suaka	13
<u>2.2.2</u> <i>Decison Making Process</i> pada Kebijakan Luar Negeri	15
<u>2.2.3</u> Konsep Idiosinkrasi.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	20
III. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Metode Penelitian.....	21

3.2	Fokus Penelitian	21
3.3	Sumber Data	21
3.4	Teknik Pengumpulan Data	22
3.5	Teknik Analisis Data	22
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1.	Masalah Kedatangan Pencari Suaka di Australia.....	24
4.2.	Faktor Idiosinkratik PM Scott Morrison	32
<u>4.2.1.</u>	Dasar Impian	38
<u>4.2.2.</u>	Peran Mentor	43
<u>4.2.3.</u>	Pengaruh Pengalaman Awal.....	45
<u>4.2.4.</u>	Karakter Kepemimpinan	47
<u>4.2.5.</u>	Keyakinan Agama	51
<u>4.2.6.</u>	Identitas lokal	53
<u>4.2.7.</u>	Inspirasi dari Pemimpin Negara Lain.....	55
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2.	Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
4.1. Jumlah kedatangan pencari suaka 2018-2022.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Pusat Penahanan di Pulau Manus, Papua Nugini	25
2.1. Kerangka Pemikiran	18
4.1. Kedatangan Kapal Pencari Suaka	21
4.2. Scott Morrison.....	28
4.3. Pajangan di kantor Scott Morrison.....	40
4.4. Dukungan Trump di Media Twitter.....	46

DAFTAR SINGKATAN

CAT	: <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i>
CROC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
ICCPR	: <i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
OSB	: <i>Operation Sovereign Borders</i>
OHCHR	: <i>The Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PM	: Perdana Menteri
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugee</i>
UPR	: <i>Universal Periodic Review</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di abad ke-21, aktifitas perpindahan pencari suaka¹ telah menjadi isu global. Krisis politik dan konflik bersenjata yang terus terjadi di sejumlah negara menyebabkan kehidupan warga sipil menjadi terancam sehingga harus melewati lintas batas negara untuk meminta perlindungan. Jumlah orang yang meninggalkan rumah untuk mendapatkan perlindungan mencapai 89,3 juta pada tahun 2021 (UNHCR, 2022). Dengan jumlah tersebut, secara geografis seluruh regional telah terlibat sebagai tempat asal, transit maupun tujuan orang-orang yang hendak meminta perlindungan.

Australia adalah salah satu negara tujuan para pencari suaka dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Australia telah didatangi oleh para pencari suaka sejak ditetapkan sebagai negara federasi pada 1901 (Asylum Insight, 2013). Australia menjadi tujuan para pencari suaka yang melarikan diri dari berbagai konflik, penganiayaan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara asal mereka. Pada awal abad ke-20, Australia menerima pengungsi politik dari Eropa, pengungsi selama Perang Dunia II dan pencari suaka dari Asia Tenggara pasca-Perang Vietnam (Asylum Insight, 2013). Selama beberapa dekade berikutnya, jumlah kedatangan pencari suaka ke Australia mengalami kenaikan dan penurunan sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa global.

Australia memiliki kewajiban untuk melindungi para pencari suaka yang berada di Australia berdasarkan Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) dan Protokol 1967 yang telah diratifikasi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi, Australia berkewajiban untuk mempertimbangkan kasus orang-orang yang meminta

¹Istilah “pencari suaka” seringkali digunakan bersamaan dengan istilah “pengungsi” dan “migran”. Namun, ketiga istilah ini memiliki perbedaan secara hukum. Pencari suaka adalah sebutan bagi orang-orang yang belum mendapatkan status kepengungsian oleh UNHCR. Adapun pengungsi adalah orang-orang yang telah mendapatkan status kepengungsian dan migran adalah seseorang yang mendatangi negara lain dengan tujuan tertentu, terutama kesejahteraan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada isu terkait pencari suaka.

perlindungan ke Australia dan memberikan perlindungan jika mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip *non-refoulement* dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi yang melarang pengembalian pencari suaka ke negara yang mengancam nyawa dan kebebasannya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. Selain Konvensi Pengungsi, prinsip *non-refoulement* juga terdapat dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* yang diratifikasi pada tahun 1989, *Convention on the Rights of the Child (CROC)* yang diratifikasi pada tahun 1991, dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diratifikasi pada tahun 1980. Semua konvensi internasional yang telah diratifikasi menunjukkan adanya kewajiban Australia dalam melindungi hak asasi manusia para pencari suaka yang datang ke negara tersebut untuk mencari perlindungan.

Walaupun memiliki kewajiban kemanusiaan, sejak tahun 2001, Australia menerapkan kebijakan yang ketat dalam menangani para pencari suaka yang datang ke Australia. Hal ini dipicu oleh *Tampa Crisis*, yakni sebuah peristiwa ketika perahu Indonesia yang mengangkut 433 pencari suaka dari Afghanistan terdampar di perairan internasional yang berjarak sekitar 140 kilometer sebelah utara Pulau Christmas (NMA, 2013). Para pencari suaka tersebut diselamatkan oleh kapal Norwegia bernama MV Tampa, atas arahan *Australian Maritime Safety Authority*. Kapal Tampa awalnya berencana membawa pencari suaka tersebut ke Indonesia, tetapi beberapa pencari suaka menolak, sementara yang lainnya meminta agar dibawa ke Australia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Australia secara tegas menolak kedatangan pencari suaka tersebut ke wilayah Australia. Perdana Menteri Australia saat itu, yakni John Howard, menyatakan bahwa Australia membatasi kedatangan ilegal yang semakin tidak terkendali demi kepentingan nasional (NMA, 2013). Sejak saat itu, Australia terus mempertahankan posisi untuk menolak pencari suaka yang datang melalui jalur laut.

Pada masa pemerintahan John Howard, Pemerintah Australia secara konsisten mengembalikan perahu pencari suaka yang mencoba memasuki wilayah perairan Australia. Sepanjang 2001 hingga 2003, Australia telah mengembalikan lima perahu yang membawa sebanyak 614 pencari suaka (Refugee Council, 2022). Sementara itu, pada masa pemerintahan selanjutnya yang dipegang oleh partai buruh, Australia sempat menghentikan kebijakan pengembalian perahu.

Pada 2013, di bawah pemerintahan partai liberal, Australia kembali melakukan penolakan perahu pencari suaka. Terhitung sejak 2013 hingga 2022, jumlah pencari suaka yang datang dengan perahu dan dipulangkan oleh pemerintah mencapai 885 orang (Refugee Council, 2022).

Tidak hanya menolak kapal pencari suaka, sejak tahun 2013 Pemerintah Australia juga memberlakukan *offshore processing*, yakni pemrosesan status para pencari suaka di luar negara Australia, tepatnya di Nauru dan Papua Nugini. Para pencari suaka ditempatkan di pusat penahanan yang disediakan pemerintah hingga proses pemeriksaan selesai.



Gambar 1.1. Pusat penahanan di Pulau Manus, Papua Nugini.
Sumber: The Guardian

Sejak 2013, Pemerintah Australia telah mengirim sebanyak 3.127 orang ke pusat penahanan (Refugee Council, 2023). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.112 orang telah teridentifikasi sebagai pengungsi dan sebanyak 1.026 orang di antaranya telah dimukimkan di Amerika Serikat (Refugee Council, 2023). Pencari suaka yang tidak teridentifikasi sebagai pengungsi atau tidak dimukimkan memperoleh penanganan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, 777 orang tercatat telah dikembalikan Pemerintah Australia ke negara asal, sementara 550 orang tercatat telah mendapatkan visa temporer dari Pemerintah Australia dan 178 orang masih harus tinggal di pusat penahanan di Nauru dan Papua Nugini.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison tahun 2018 sampai 2022, Pemerintah Australia menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani pencari suaka. Dengan melanjutkan tindakan penolakan perahu, pemerintahan Scott Morrison menggunakan pendekatan *zero tolerance* dalam menangani pencari suaka yang datang dengan perahu (9NEWS, 2019). Secara tegas, di bawah pemerintahannya, Scott Morrison menyatakan bahwa tidak

seorang pun yang mencoba melakukan perjalanan perahu secara ilegal ke Australia akan diizinkan untuk menetap di negara tersebut. Scott Morrison juga mengatakan “*you will not succeed*” sebagai peringatan kepada pencari suaka yang hendak memasuki Australia dengan perahu. Kampanye yang dilakukan Scott Morrison tersebut telah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa, termasuk bahasa dari negara asal pencari suaka seperti Pakistan, Afganistan, Bangladesh dan Irak (9NEWS, 2019).

Untuk mencapai tujuannya, Scott Morrison memberlakukan *Operation Sovereign Borders* (OSB) dalam menangani pencari suaka yang datang dengan perahu. OSB telah diterapkan oleh pemerintah Australia sejak 2013 dan dilanjutkan kembali oleh PM Scott Morrison di masa pemerintahannya. OSB merupakan sebuah operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh badan militer Australia untuk mencegah pencari suaka tiba dengan kapal di wilayah negara (*Department of Home Affairs*, 2013). Dalam operasi ini, pemerintah memperketat perlindungan perbatasan untuk mencegah pencari suaka datang melalui jalur laut dengan cara melibatkan badan militer yakni *Australian Border Force*. *Australian Border Force* bertugas melakukan patroli maritim di perbatasan Australia untuk memantau dan mendeteksi perahu tidak sah yang mencoba memasuki perairan Australia (ABF, 2015). Setelah mendeteksi perahu yang berisi para pencari suaka, pemerintah melakukan pengembalian perahu tersebut ke titik asalnya.

Pada masa pemerintahan Scott Morrison, terdapat kesenjangan yang jelas antara kewajiban kemanusiaan dan kondisi faktual di Australia. Jika dilihat berdasarkan konvensi yang telah diratifikasinya, Australia telah berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia para pencari suaka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Namun, pada masa Scott Morrison Australia justru menggunakan pendekatan *zero tolerance* dan mengadopsi kebijakan untuk menolak para pencari suaka yang datang dengan perahu dengan alasan apapun. Keputusan dalam pembuatan kebijakan ini sangat tergantung pada sudut pandang Scott Morrison sebagai pemimpin. Untuk memahami kebijakan secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis terhadap semua faktor yang terlibat dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor idiosinkratik dari pemimpin pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kebijakan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Australia. Sebagai contoh, penelitian Maria (Maria, 2018) yang menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan, ambisi, pengalaman

pribadi, dan persepsi John Howard mempengaruhi kebijakan luar negerinya dalam menangani imigran gelap di Australia tahun 1996-2007. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Blair dan Alam (Blair & Alam, 2018) tentang sikap publik terhadap pencari suaka menunjukkan bahwa sikap dan pandangan publik terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia sangat dipengaruhi oleh pemimpin, terutama berkaitan dengan retorika politik yang dibuat oleh perdana menteri. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi dan penanganan pengungsi di Australia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor idiosinkratik pemimpin pemerintahan seperti pandangan politik dan retorika publik. Melalui analisis faktor idiosinkratik yang difokuskan pada PM Scott Morrison saat ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang tujuan, motivasi, dan keputusan yang melatarbelakangi kebijakan. Oleh karena itu, analisis faktor idiosinkratik Scott Morrison menjadi penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang kebijakan penanganan pencari suaka di Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Kedatangan pencari suaka melalui jalur laut telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Australia selama empat dekade. Berbagai macam kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka melalui jalur laut. Pada masa pemerintahan Scott Morrison, Australia secara tegas menolak kedatangan pencari suaka dari jalur laut dengan menggunakan pendekatan *zero tolerance* dan memberlakukan kebijakan *Operation Sovereign Border*. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa tidak ada pencari suaka dari jalur laut dapat masuk dan tinggal di Australia. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi alasan ditetapkannya kebijakan yang ditetapkan di masa pemerintahan Scott Morrison dengan memfokuskan analisis pada Scott Morrison sebagai aktor pembuat kebijakan. Karena itu, pertanyaan pada penelitian ini adalah “Apa faktor-faktor idiosinkratik PM Scott Morrison yang mempengaruhi kebijakan penanganan pencari suaka di Australia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan menjadi arahan bagi penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedatangan pencari suaka sebagai salah satu masalah di Australia, dan
2. Menganalisis faktor-faktor idiosinkratik PM Scott Morrison yang mempengaruhi kebijakan penanganan pencari suaka di Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini menarik kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan sebagai informasi tambahan pada kajian kebijakan luar negeri, khususnya dalam pembahasan tentang kebijakan perlindungan perbatasan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi wawasan para akademisi Hubungan Internasional dalam topik-topik terkait pencari suaka. Rekomendasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan di tengah maraknya isu perpindahan pencari suaka.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau enam penelitian terdahulu untuk memetakan informasi mengenai kebijakan OSB. Beberapa penelitian tersebut adalah karya Sixtus Obioma Ibekwe, Fakhru Rizal Razak, Ismail Adi Santoso, Fr. Frank Brennan, Taufik Eko Hidayanto, serta Rheeno Hamdani Hudan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sixtus Obioma Ibekwe pada tahun 2021 berjudul *Preventing People from Risking Their Lives at Sea: Forced Migration and the Securitization of Asylum Seekers in Australia* (Ibekwe, 2021). Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan OSB dari sudut pandang rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat penerapan kebijakan detensi dan penghentian kapal serta menunjukkan kaitannya dengan misi Australia dalam OSB. Ibekwe menggunakan beberapa konsep pada penelitiannya, antara lain: 1) konsep *forced migration*, 2) konsep sekuritisasi, dan 3) konsep kedaulatan nasional. Metode yang digunakan Ibekwe dalam penelitiannya adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini memaparkan bahwa Pemerintah Australia melihat kedatangan pencari suaka dengan kapal sebagai sebuah ancaman bagi keamanan wilayah dan identitas sosial politik di Australia (Ibekwe, 2021). Pemerintah Australia menetapkan OSB yang salah satu misinya adalah mencegah orang-orang agar tidak menghadapi risiko dalam perjalanan melalui jalur laut. Dalam implementasinya, kebijakan OSB menjadi bentuk kampanye yang ditujukan kepada pencari suaka di seluruh dunia agar tidak memasuki wilayah Australia dengan kapal. Dengan adanya OSB, Australia mengharapkan kesadaran pencari suaka agar tidak turut memasuki wilayah Australia melalui jalur laut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini justru lebih membahayakan para pencari suaka daripada memberikan keamanan bagi mereka

(Ibekwe, 2021). Lalu, penelitian ini menyimpulkan bahwa misi kemanusiaan Australia untuk ‘mencegah pencari suaka membahayakan hidupnya di laut’ tidak dapat dicapai dalam OSB.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Fakhru Rizal Razak pada tahun 2018 dengan judul Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013 (Razak, 2018). Razak menganalisis pengambilan kebijakan militer yang dilakukan oleh Australia dalam menghadapi kedatangan para imigran ilegal melalui jalur laut. Penelitian ini memiliki tujuan yakni menjelaskan alasan Australia menetapkan kebijakan OSB yang militeristik serta memaparkan sekuritisasi Australia terhadap permasalahan imigran. Penelitian ini menggunakan konsep resekuritisasi dengan berfokus pada *five strands of securitization* menurut Juha A. Viori (Razak, 2018). Metode yang digunakan Razak dalam penelitiannya adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini memiliki asumsi dasar bahwa kedatangan pencari suaka melalui jalur laut merupakan sebuah ancaman eksistensial bagi Australia (Razak, 2018). Penelitian ini memaparkan bahwa penetapan OSB di masa pemerintahan Tony Abbott pada 2013 dapat diartikan sebagai proses resekuritisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pemikiran kembali isu yang pernah disekuritisasi pada masa pemerintahan John Howard pada 2001, yang kemudian dijadikan isu keamanan lagi oleh Tony Abbott di tahun 2013. Pemerintah Australia sebagai *securing actors* melakukan sekuritisasi dengan cara: 1) menjadikan isu imigran ilegal sebagai salah satu agenda keamanan nasional 2) memberikan efek *deterrence* (penggentaran) (Razak, 2018). Pemerintah Australia melakukan *speech act* dengan mendeklarasikan urgensi isu imigran ilegal, menghentikan praktik politik normal dan menerapkan tindakan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa OSB adalah bentuk tindakan luar biasa atau di luar kebiasaan normal yang dihasilkan dari adanya resekuritisasi.

Ketiga, penelitian yang ditulis Ismail Adi Santoso berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia di Era Pemerintahan PM Tony Abbot (Santoso, 2020). Penelitian ini menganalisis dua kebijakan, yakni *Free Trade Agreement*

dan *Operation Sovereign Borders (OSB)*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis keputusan-keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan PM Tony Abott. Teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya serta analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, OSB yang dibentuk oleh Tony Abbott dilihat sebagai salah satu kebijakan Australia untuk mencapai kepentingan nasional (Santoso, 2020). Tujuan OSB sebagaimana dipaparkan oleh Tony Abott adalah menanggulangi kejahatan lintas negara. Hal ini sejalan dengan praktik OSB yang dilakukan oleh badan militer Australia, yakni perlindungan perbatasan negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa Australia berupaya untuk menghemat biaya pengurusan migran di dalam wilayah negara (Santoso, 2020). Dari berbagai tujuan yang dicapai pasca penetapan kebijakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa OSB telah cukup memenuhi kepentingan nasional Australia.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Fr. Frank Brennan S.J. berjudul *Human Rights and the National Interest: the Case Study of Asylum, Migration, and National Border Protection* (Brennan, 2016). Penelitian ini mengaitkan antara hak asasi migran dan pengungsi dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji kebijakan terkait perlindungan pencari suaka, migran, dan perbatasan negara di Amerika Serikat dan Eropa untuk menilai kebijakan yang ada di Australia. Penelitian ini mengkombinasikan dua pendekatan, yakni liberalisme demokratis dan realisme. Konsep utama dalam penelitian ini adalah konsep hak asasi manusia dan konsep kepentingan nasional. Metode yang digunakan Brennan dalam penelitiannya adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Brennan ini memaparkan bahwa aturan yang tercantum dalam hukum internasional harus menjadi prinsip dan acuan pragmatis dalam perlindungan hak asasi migran dan pencari suaka di Australia. Kebijakan OSB Australia dinilai bertolak belakang dengan prinsip dalam hukum internasional yakni Konvensi Pengungsi (Brennan, 2016). Namun, peneliti berargumen bahwa Pemerintah

Australia tetap perlu mempertahankan OSB untuk mencegah kedatangan ilegal dan permasalahan lain yang berpotensi terjadi di perbatasan negara. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kasus di Amerika Serikat dan Eropa, ditemukan bahwa negara demokratis cenderung sulit menyeimbangkan antara moralitas untuk melindungi pencari suaka dan kepentingan keamanan untuk menolak kedatangan ilegal (Brennan, 2016). Di sisi lain, apabila negara demokratis ingin menetapkan solusi berupa *open border policy*, prinsip keamanan negara akan menjadi masalah. Penelitian ini menyimpulkan, kepentingan nasional dapat dicapai dengan tetap berpegang pada hukum internasional. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan menghentikan kapal dalam OSB, tetapi harus tetap menerapkan perlindungan perbatasan.

Kelima, penelitian yang ditulis Taufik Eko Hidayanto berjudul Kebijakan Australia dalam Mengatasi *Illegal Immigrant* di bawah Pemerintahan PM Tony Abbott. Penelitian ini menganalisis pembentukan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) untuk mengontrol kedatangan imigran. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang proses pembuatan keputusan oleh Pemerintah Australia, kepentingan yang dicapai Australia, serta respons dunia internasional terhadap kebijakan Australia. Teori dalam penelitian ini adalah teori *decision making* yang dikemukakan oleh William Coplin. Konsep yang digunakan adalah konsep kepentingan nasional oleh Hans J. Morgenthau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa kedatangan imigran melalui jalur laut dapat berdampak pada kedaulatan dan keamanan negara (Hidayanto, 2016). Pembuatan keputusan oleh PM Tony Abbott dilandasi oleh situasi politik domestik yang menuntut Australia untuk melindungi perbatasan negara. Dalam konteks internasional, para imigran dan pencari suaka ingin masuk ke Australia yang merupakan negara maju. Namun, Australia sendiri berkepentingan mensejahterakan masyarakat tidak hanya dalam perekonomian dan pendidikan, melainkan juga dalam keamanan (Hidayanto, 2016). Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang tinggi, Australia membentuk OSB untuk pertahanan,

pengembalian kapal, penahanan pencari suaka, serta pemulangan atau penempatan pencari suaka ke negara lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan kebijakan OSB lebih efektif daripada pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya dalam pencapaian keamanan perbatasan Australia.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Rheeno Hamdani Hudan berjudul *Kontradiksi Operation Sovereign Borders Australia terhadap Peratifikasian Konvensi Pengungsi tahun 1951* (Hudan, 2019). Penelitian ini menganalisis pembentukan kebijakan OSB oleh Pemerintah Australia OSB dan kaitannya dengan komitmen Australia dalam Konvensi Pengungsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang wacana yang diciptakan Australia dalam OSB, serta melihat persepsi Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka dalam kerangka keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan sekuritisasi dalam menganalisis OSB serta persepsi pengungsi dan pencari suaka di Australia. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan keamanan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pembahasan dalam penelitian diawali dengan pemaparan mengenai status Australia dalam Konvensi Pengungsi yang merupakan dokumen utama terkait pengungsi dan hak pengungsi serta kewajiban negara dalam pemenuhan hak tersebut. Australia berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi yang datang ke wilayah negara, tetapi Pemerintah Australia justru menerapkan kebijakan OSB untuk menolak kedatangan pengungsi yang menggunakan perahu. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kepentingan Australia dan kaitannya dengan isu pengungsi dan pencari suaka. Jika dilihat dari kepentingannya, pemerintah dan masyarakat Australia memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan ancaman integritas perbatasan dan keamanan nasional dari adanya kedatangan pengungsi dan pencari suaka (Hudan, 2019). Analisa penelitian tersebut dilanjutkan dengan pemaparan tentang persepsi Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Pemberitaan Australia terkait OSB menunjukkan kesan bahwa pencari suaka adalah sebuah ancaman di wilayah perbatasan laut, sedangkan militerisasi menjadi kunci untuk menghadapi ancaman

eksistensial tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi Australia bertentangan dengan prinsip non-hukuman dan *non-refoulement* dalam konvensi Konvensi Pengungsi (Hudan, 2019).

Enam penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kebijakan penanganan pencari suaka ilegal di Australia serta sekuritisasi isu pencari suaka ilegal di Australia. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan konsep yang digunakan untuk menggambarkan pencari suaka ilegal, yakni dengan menggunakan konsep migrants dan pengungsi. Dalam penelitian ini, konsep yang akan digunakan adalah pencari suaka. Selain itu, apabila penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan konsep sekuritisasi dan kepentingan nasional dalam menganalisis kebijakan, maka dalam penelitian ini akan fokus terhadap faktor idiosinkratik dari pemimpin yang berhubungan dengan keputusan-keputusannya.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Indikator	Sixtus O. Ibekwe	Fakhrul R. Razak	Ismail A. Santoso	Fr. Frank Brennan	Taufik E. Hidayanto	Rheeno H. Hudan
Judul Penelitian	<i>Preventing People from Risking Their Lives at Sea': Forced Migration and the Securitization of Asylum Seekers in Australia</i>	Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013	Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia di Era Pemerintahan PM Tony Abbott	<i>Human Rights and the National Interest: the Case Study of Asylum, Migration, and National Border Protection</i>	Kebijakan Australia dalam Mengatasi <i>Illegal Immigrant</i> di bawah Pemerintahan PM Tony Abbott	Kontradiksi <i>Operation Sovereign Borders</i> Australia terhadap Peratifikasian Konvensi Pengungsi Tahun 1951
Fokus Penelitian	Implementasi OSB dan kaitannya dengan misi mencegah perjalanan melalui jalur laut	Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam OSB	Kepentingan nasional Australia yang dikemukakan PM Tony Abbott dalam keputusan <i>Free Trade Agreement</i> dan OSB	Prinsip kemanusiaan dan kepentingan nasional Australia dalam OSB	Proses pembuatan keputusan, kepentingan yang telah dicapai, serta respons dunia internasional terhadap OSB	Argumen keamanan nasional dalam pembuatan wacana serta citra pengungsi dan pencari suaka dalam kebijakan OSB
Teori/ Konsep	Konsep forced migration Konsep sekuritisasi Konsep kedaulatan nasional	- Konsep resekuritisasi (<i>five strands of securitization</i>) menurut Juha A. Viori - Konsep kepentingan nasional	- Teori kebijakan luar negeri - Konsep kepentingan nasional	- Konsep Hak Asasi Manusia - Konsep kepentingan nasional	- Teori <i>Decision making</i> oleh William Coplin - Konsep kepentingan nasional oleh Hans Morgenthau	- Teori Sekuritisasi - Konsep Keamanan nasional
Hasil Penelitian	Secara sistematis,	OSB merupakan	OSB dibentuk	OSB untuk keamanan	OSB dapat memenuhi	OSB bertentangan

Indikator	Sixtus O. Ibekwe	Fakhrul R. Razak	Ismail A. Santoso	Fr. Frank Brennan	Taufik E. Hidayanto	Rheeno H. Hudan
	OSB telah membahayakan pencari suaka dan melanggar hak asasi mereka. Misi OSB untuk mencegah orang-orang melakukan migrasi melalui jalur laut dengan OSB tidak tercapai secara efektif karena operasi ini justru lebih menyebabkan banyak nyawa melayang.	bentuk kebijakan darurat Australia yang bersifar unilateral dan asertif. Diterapkannya OSB menjadi wujud sikap politik Australia untuk membuat keputusan yang darurat. Isu pencari suaka dideklarasikan oleh Pemerintah Australia sebagai ancaman yang nyata.	untuk memenuhi kepentingan nasional Australia, yakni melindungi perbatasan dan menghemat biaya pengurusan migran.	perbatasan merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh Australia dibandingkan dengan membuka perbatasan dan mengacu pada komitmen untuk menerima pengungsi.	tugas pertahanan wilayah serta penanganan pencari suaka. Perumusan kebijakan OSB lebih efektif daripada perumusan kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya dalam upaya pencapaian keamanan perbatasan Australia.	dengan prinsip non- hukuman dan <i>non-refoulement</i> dalam Konvensi Pengungsi. Pemberitaan Australia terkait OSB menunjukkan bahwa pencari suaka adalah ancaman di wilayah perbatasan laut dan militerisasi menjadi kunci untuk menghadapi ancaman eksistensial tersebut.

Sumber data: diolah peneliti dari berbagai sumber

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pencari Suaka

Suaka adalah sebutan bagi tempat mengungsi atau berlindung (KBBI Daring, 2016), sehingga para pencari suaka secara sederhana dapat diartikan sebagai orang-orang yang sedang mencari tempat untuk berlindung. Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, hak untuk mengklaim suaka merupakan hak setiap orang yang telah dilindungi oleh PBB. Jadi, para pencari suaka juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang menggunakan haknya untuk mengklaim suaka di negara lain. UNHCR sebagai badan PBB yang berfokus pada permasalahan pengungsi mendefinisikan pencari suaka dalam konteks status kepengungsian. Menurut UNHCR, pencari suaka adalah orang-orang yang klaim atas kepengungsian mereka belum ditentukan (UNHCR, 2022). Para pencari suaka perlu melewati sejumlah prosedur penentuan status pengungsi agar dapat bermukim secara sah di suatu negara.

Dalam pembukaan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganjurkan agar negara-negara melakukan kerjasama dalam pengelolaan pengungsi dengan penjelasan sebagai berikut: *“Menimbang bahwa hibah pencari suaka dapat menempatkan beban yang terlalu berat pada negara-negara tertentu, dan bahwa penyelesaian yang memuaskan atas suatu masalah yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai ruang lingkup dan sifatnya internasional, oleh karena itu tidak dapat dicapai tanpa kerja sama internasional”* (UNHCR, 2001) Atas dasar tersebut, para pengungsi mencari perlindungan ke negara-negara tetangga atau negara lainnya yang terbuka terhadap kedatangan pengungsi.

Konvensi Pengungsi juga menyatakan bahwa, dengan pengecualian tertentu, pencari suaka tidak boleh dikenai hukuman atas masuk atau tinggal secara ilegal. Hal ini mengakui bahwa pencarian suaka dapat memaksa orang-orang untuk melanggar aturan imigrasi. Hukuman yang dilarang antara lain terkait dengan tuduhan pelanggaran imigrasi atau kejahatan yang berkaitan dengan pencarian suaka, atau penahanan sewenang-wenang semata-mata atas dasar pencarian suaka. Prinsip *non-refoulement* atau tidak mengembalikan pencari suaka ke tempat asal di mana ia merasa terancam merupakan dasar utama, sehingga tidak diizinkan adanya alasan atau pengecualian apapun terhadap prinsip tersebut.

Orang-orang yang mendatangi Australia untuk meminta perlindungan dapat disebut sebagai para pencari suaka karena mereka belum mendapatkan status kepengungsian yang sah. Para pencari suaka yang datang ke wilayah Australia melalui jalur laut pada umumnya merupakan orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat sehingga harus meninggalkan negaranya. Para pencari suaka ini mengungsi di Australia untuk menghindari konflik di negara asal yang dapat mengancam kehidupan dan kebebasan mereka.

Dalam keadaan genting, para pencari suaka seringkali tidak membawa dokumen penting yang diperlukan untuk memasuki wilayah Australia seperti visa dan paspor. Para pencari suaka ini juga terdesak oleh keadaan sehingga menggunakan jasa dari para penyelundup yang menggunakan kapal untuk melintasi batas negara. Karena itu, masalah kedatangan pencari suaka berkaitan erat dengan masalah penyelundupan manusia yang merupakan salah satu

kejahatan transnasional.

2.2.2 *Decision Making Process* pada Kebijakan Luar Negeri

Analisis proses *decision making* atau *decision making process* pada kebijakan luar negeri bertujuan memahami bagaimana kebijakan luar negeri di suatu negara dirumuskan atau diberlakukan (Blankshain, 2019). Dalam hal ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor tertentu menggunakan proses *decision making* tertentu. Menurut Valerie M. Hudson, *decision making* merupakan proses dan hasil pembuatan kebijakan dari individu pembuat kebijakan yang memiliki konsekuensi di luar negara (Hudson, 2005). *Decision making process* dapat berupa keputusan tunggal pemimpin, urutan keputusan pada situasi tertentu, identifikasi masalah, penentuan prioritas tujuan, dan lain sebagainya (Hudson, 2005). Menurut Hudson, penjelasan *decision making process* dapat bersifat multifaktorial dengan memeriksa lebih dari satu variabel dan tingkat analisis (Hudson, 2005).

Menurut L. Andy Afinotan dalam "*Decision Making in International Relation: A theoretical Analysis*", konsep *decision making* dalam keilmuan Hubungan Internasional melibatkan proses pemilihan di antara berbagai pilihan tindakan yang tersedia (Afinotan, 2014). Dalam menjalankan sistem politik dan institusional yang modern, para *decision maker* seringkali dihadapkan pada kompleksitas tantangan besar dan kecil yang memerlukan tindakan tegas sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi berbagai kepentingan korporat dalam kerangka institusional, *decision maker* dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih di antara berbagai opsi kebijakan yang bersaing. Jadi, dapat dikatakan bahwa *decision making* merupakan proses berpikir yang menghasilkan pilihan di antara berbagai opsi tindakan yang tersedia.

Adapun menurut Afinotan tentang analisis *decision maker* adalah bahwa seorang *decision maker* dihadapkan pada sejumlah alternatif yang terdefinisi dengan baik dan saling eksklusif yang dapat dipilihnya. Sebagai aktor rasional

yang terdidik dan terampil, *decision maker* mampu memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil. Dengan asumsi-asumsi ini, pengambil keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif, membandingkan semua alternatif, dan memilih alternatif yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan, atau dalam perspektif permainan memilih strategi yang memaksimalkan utilitas dan meminimalkan penyesalan. Dalam praktiknya, juga diasumsikan pentingnya homogenitas tujuan dan menghitung jumlah alternatif yang tak terbatas dan nilai yang diharapkan dari setiap alternatif, diasumsikan adanya kemampuan perhitungan yang tak terbatas dan pengetahuan luas sebagai prinsip dasar (Afinotan, 2014).

Analisis *decision making process* dalam penelitian ini berada pada level individu dengan melihat bagaimana pemimpin pemerintahan membuat keputusan kebijakan luar negeri. Adapun hal-hal yang dapat membedakan keputusan antara pemimpin satu dengan yang lainnya adalah pada cara mereka membentuk preferensi, memformulasikan sebuah keputusan, serta menerima atau memproses informasi (Blankshain, 2019). Dengan mengadopsi analisis *decision making* pada tingkat individu, penelitian ini mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang latar belakang kebijakan. Selain itu juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana individu memutuskan pilihan yang atas suatu kondisi.

2.2.3 Konsep Idiosinkrasi

Menurut Valerie M. Hudson dalam "*Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*", pada tahun 1950-an dan 1960-an terdapat tiga pemikiran yang menjadi dasar analisis individu dalam kebijakan luar negeri (Hudson, 2005). Pemikiran tersebut tercantum pada tulisan Snyder, Bruck, dan Sapin; Rosenau; dan Sprout dan Sprout. Ketiga pemikiran tersebut mengakui pentingnya memahami kekhasan (idiosinkrasi) manusia sebagai pembuat kebijakan luar negeri dalam memahami pilihan-pilihan kebijakannya. Kekhasan ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tak terlihat

seperti dalam studi negara tradisional, melainkan harus dianggap sebagai variasi teori yang relevan (Hudson, 2005). Dalam Kamus Cambridge, idiosinkrasi sendiri memiliki arti pola perilaku, cara berpikir, atau fitur khas dari individu (Cambridge Dictionary, 2020).

Seiring dengan perkembangan studi tentang individu dalam kebijakan luar negeri, terdapat juga pemikiran yang meyakini bahwa individu memegang peran paling penting dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, menurut Caitlin Smith, pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri merupakan hasil dari '*human agency*', yang berarti bahwa individu sebagai aktor memiliki peran utama dalam proses *decision making*, bukan negara secara keseluruhan. (Smith, 2012). Selain Smith, Valerie M. Hudson juga menyatakan bahwa negara bukan merupakan agen, karena negara adalah sebuah abstraksi (Hudson, 2005). Hanya manusia yang bisa menjadi agen sejati dan menjadi sumber dari semua politik internasional dan perubahan di dalamnya. Hudson menambahkan, semua hal yang terjadi antar negara atau lintas negara didasarkan pada individu pembuat keputusan yang bertindak sendiri atau berkelompok (Hudson, 2005). Oleh karena itu, landasan Hubungan Internasional merupakan landasan yang sama dengan semua ilmu sosial, yakni memahami bagaimana manusia merasakan dan bereaksi terhadap dunia di sekitar mereka serta bagaimana mereka membentuk dan dibentuk oleh dunia di sekitar mereka. Apabila teori Hubungan Internasional tidak menyertakan 'manusia', maka akan keliru dalam menggambarkan tentang dunia karena tidak akan ada perubahan, kreatifitas, persuasi, dan akuntabilitas di dalamnya (Hudson, 2005).

Perkembangan analisis individu tidak terlepas dari asumsi bahwa pikiran para pembuat kebijakan mengandung informasi yang kompleks dan rumit seperti keyakinan, sikap, nilai, pengalaman, emosi, sifat, gaya, ingatan, kebangsaan, dan konsep diri. Selain itu, hal-hal seperti latar belakang dan pengalaman juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menganalisis individu pada proses pembuatan kebijakan luar negeri. Salah satunya adalah analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Jerrold M. Post untuk melihat idiosinkrasi pemimpin. Jerrold M. Post mencetuskan tentang psikobiografi sebagai salah satu kerangka konseptual dalam analisis individu

pembuat kebijakan. Adapun fokus pada pembahasannya adalah *Foundations of the Dream* (Dasar Impian), *The Role of the Mentor* (peran mentor), dan *The Influence of Early Experiences* (pengaruh pengalaman awal) (Post, 2003). Penelitian ini melihat faktor-faktor tersebut serta faktor lainnya sesuai pengamatan peneliti, dengan penjabaran sebagai berikut:

Pada bagian *foundations of the dream*, peneliti melihat pengaruh *role model* atau panutan dalam kehidupan individu sejak masa kecil. Hal ini melibatkan identifikasi tokoh-tokoh yang diidolakan dan menjadi inspirasi dalam mencapai ambisi politik (Post, 2003). Semakin kuat peneliti memahami ambisi pemimpin, maka akan semakin yakin juga dalam menyimpulkan pengaruh psikologis pemimpin tersebut terhadap pembuatan kebijakan (Post, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat *role model* pada masa kecil, tetapi juga pada masa dewasa pemimpin, dengan asumsi bahwa pemimpin dapat mengamati dan meniru perilaku *role model* yang efektif dalam kepemimpinan. Dalam situasi kepemimpinan yang spesifik dan kompleks di masa dewasa, melihat role model dengan latar belakang, pengalaman, dan situasi yang serupa dapat membantu pemimpin mengembangkan kepemimpinan yang adaptif. Dalam dunia yang terus berubah, pemimpin perlu mampu beradaptasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, melihat role model pada masa dewasa juga memperkenalkan pemimpin pada variasi gaya kepemimpinan yang berbeda. Dengan mengamati praktik dan pendekatan yang beragam dari role model, pemimpin dapat memperluas pemahaman mereka tentang kepemimpinan dan belajar untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi yang berbeda.

Pada bagian *the role of the mentor*, peneliti mengidentifikasi tokoh yang menjadi mentor individu. Mentor di masa muda menjadi sumber peneliti untuk memahami apa yang menjadi panutan pemimpin dalam perilaku politik, sumber ide politik, dan praktik politik. Post memberi contoh mantan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, yang memiliki mentor seorang penulis bernama Vladimir Jabotinsky. Jabotinsky merupakan seorang pionir Zionis, dan impian Jabotinsky tentang memiliki tanah air yang aman bagi Yahudi sangat mempengaruhi dan menjadi inti dalam kepribadian politik Begin (Post, 2003).

Menganalisis peran mentor dapat membantu dalam menggali faktor-faktor yang memengaruhi *decision making* dan tindakan pemimpin.

Lalu, pada bagian *The Influence of Early Experiences*, peneliti melakukan pengamatan terhadap karir awal pemimpin. Menurut Post, di masa awal karir politik tersebut pola kepribadian pemimpin telah terbentuk (Post, 2003). Kepribadian ini akan terus mempengaruhi perilaku pemimpin sepanjang karir politik dan dapat menjadi semakin intensif seiring bertambahnya usia dan permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, peneliti juga dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pemimpin di masa awal karir. Post menyebutkan, pemimpin seringkali memiliki kepentingan yang dapat berpengaruh pada bagaimana ia menghadapi masalah-masalah di masa depan (Post, 2003).

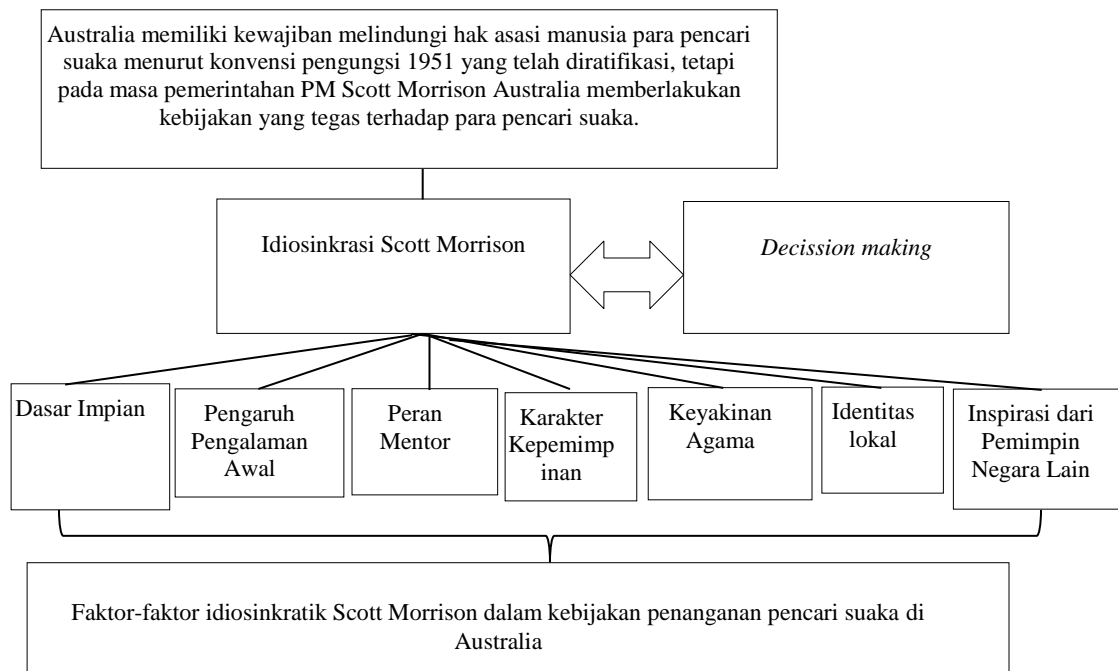
Selain penelitian kerangka konsep yang dikemukakan oleh Jerrold M. Post, penelitian ini juga melihat adanya faktor lain yakni Karakter Kepemimpinan, Keyakinan Agama, Identitas Lokal, dan Inspirasi dari Pemimpin Negara Lain. Keempat faktor ini dilihat berdasarkan riwayat pemimpin dalam karir profesionalnya. Faktor-faktor ini turut menjadi bagian dalam kekhasan yang melekat pada diri pemimpin.

Karakter Kepemimpinan mengacu pada kepribadian dan karakteristik unik yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang. Setiap pemimpin memiliki kombinasi karakter kepemimpinan yang khas, yang memengaruhi cara mereka memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, faktor *Keyakinan Agama* dapat menjabarkan sejauh mana keyakinan agama memiliki peranan penting dalam kepemimpinan seseorang. Hal ini meliputi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika yang dipengaruhi oleh keyakinan agama individu. Selain itu, variabel ini juga mencakup orientasi spiritual, inspirasi, motivasi, dan pengaruh keyakinan agama terhadap *decision making* dan tindakan seorang pemimpin. *Identitas lokal* mengacu pada latar belakang spesifik bagi individu dalam konteks kepemimpinan. Identitas lokal ini melibatkan aspek-aspek tempat asal pemimpin serta budaya di tempat asal tersebut yang merupakan bagian dari latar belakang pemimpin. Terakhir, *Mutual Understandings* mengacu pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pemahaman bersama antara para pemimpin. Ini mencakup sejauh mana pemimpin memahami dan berbagi pemahaman dengan sesama

pemimpin dalam hal nilai-nilai, visi, tujuan, dan pendekatan kepemimpinan yang diadopsi. Pemahaman bersama ini memungkinkan kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi efektif di antara para pemimpin dalam suatu konteks tertentu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Australia memiliki kewajiban kemanusiaan untuk menjaga hak asasi manusia para pencari suaka dan mengupayakan perlindungan terhadap mereka. Namun, pada masa pemerintahan Scott Morrison tahun 2018-2022, Australia tidak lagi menerima pencari suaka melalui jalur laut dan secara tegas menerapkan kebijakan penolakan kapal pencari suaka dengan menggunakan operasi militer yang dikenal sebagai *Operation Sovereign Borders* (OSB). Alasan ditetapkannya kebijakan ini akan ditunjukkan melalui analisis *decision making* dengan memfokuskan pada Scott Morrison sebagai aktor pembuat kebijakan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.

Sumber: olahan data penulis

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan yang menggunakan interpretasi atau pandangan teoretis dalam melihat fenomena sosial (Matthews & Ross, 2010). Salah satu ciri khas dari pendekatan kualitatif adalah menjawab pertanyaan penelitian dengan mencantumkan sejumlah data yang subjektif seperti pemahaman, kepercayaan, dan pengalaman (Matthews & Ross, 2010). Logika dalam penelitian ini adalah logika induktif. Desain dan strategi penelitian juga akan bersifat evolusioner, yakni dapat berubah perlahan seiring dengan berjalannya penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian utama yang ditonjolkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian pertama-tama bersifat umum di dalam pikiran penulis (Bryman, 2012). Selanjutnya, penulis dapat merumuskan beberapa penekanan dalam penelitian dengan cara membuat observasi sebanyak mungkin (Bryman, 2012). Fokus pada penelitian ini adalah pada kebijakan OSB yang diberlakukan oleh Scott Morrison pada masa jabatannya tahun 2018-2022 serta alasan Scott Morrison melakukan penolakan kapal dalam upaya menangani kedatangan pencari suaka.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat memperoleh data atau asal dari data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder,

yakni data yang menggunakan pengetahuan dari sumber-sumber lainnya, sehingga fakta-fakta yang tercantum dalam penelitian bersifat tidak langsung (Paul S. Gray, 2007). Data-data sekunder yang tercantum dalam penelitian ini berasal dari beberapa dokumen dan literatur. Dokumen didapatkan dari lembaga non-negara yakni *Refugee Council of Australia*, lembaga internasional yakni UNHCR dan OHCHR, serta laman resmi negara yakni *Parliament of Australia*, *Department of Home Affairs* dan *Australian Border Force*. Literatur bersumber dari *Encyclopedia Britannica*, *National Archives of Australia (NAA)*, *National Museum of Australia*, serta buku dan jurnal lainnya yang bersumber dari media elektronik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara mendapatkan data yang akan digunakan dalam analisis. Penelitian ini mengumpulkan data dari sekumpulan informasi yang telah tercantum pada penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi yang telah dipublikasikan secara umum. Penelitian ini mengumpulkan data dari: 1) Portal berita nasional dan internasional yang tersedia secara daring; dan 2) Buku dan jurnal yang tersedia secara daring. 3) Laporan resmi pada laman pemerintah, UNHCR, OHCHR, serta lembaga non-negara seperti *Refugee Council of Australia*.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yakni:

1. Reduksi data - proses reduksi data diawali dengan memilih,

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah data. Penulis memilih aspek dalam data yang akan ditekankan, diminimalkan, maupun dikesampingkan dalam penelitiannya.

2. Penyajian data - dalam tahap ini, penulis menyediakan berbagai kumpulan informasi secara terorganisir dan terkompresi. Data yang ditampilkan adalah data yang telah direduksi untuk memudahkan interpretasi terhadap data tersebut.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi - langkah terakhir ini seringkali melibatkan pertimbangan kembali terkait data yang dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian. Penulis menarik makna dari data yang telah ditampilkan dan memeriksa kembali kekuatan dari penulisan tersebut. Penulis melakukan pemeriksaan sebanyak yang diperlukan untuk mendapatkan penemuan yang valid dari penelitiannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kedatangan pencari suaka di Australia merupakan fenomena yang telah terjadi selama beberapa dekade. Kebijakan Australia terhadap pencari suaka telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dengan pemerintahan Scott Morrison menerapkan pengetatan kebijakan dan fokus pada pengawasan perbatasan laut. Kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB) diterapkan dengan tujuan menolak pencari suaka yang datang secara ilegal dan mengembalikan mereka ke negara asal atau negara pihak ketiga. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencegah kedatangan pencari suaka melalui jalur ilegal.

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada faktor idiosinkratik Scott Morrison sebagai pembuat kebijakan pencari suaka. Jika dilihat dari faktor Dasar Mimpi, pengalaman ayahnya sebagai polisi dan tokoh ambisius memengaruhi pandangan dan nilai-nilai keamanan Morrison dalam politik. Scott Morrison juga mengidentifikasi William Pitt dan Franklin D. Roosevelt memberikan inspirasi kepada Morrison dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinannya. Dalam faktor Peran Mentor, Scott Morrison menjalin hubungan erat dengan Howard yang memiliki gagasan serupa tentang pencari suaka.

Berdasarkan faktor Pengaruh Pengalaman Awal, pengalaman dan wawasannya sebagai Menteri Imigrasi mempengaruhi kebijakan yang diterapkan saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Dilihat dari faktor Karakter Kepemimpinan, Scott Morrison menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat dan teguh dengan mempertahankan keyakinan politiknya tanpa mengikuti persepsi stereotip. Namun, ia juga dikritik karena kurangnya transparansi dan empati dalam menghadapi masalah imigrasi. Dari faktor Keyakinan Agama, Scott Morrison menegaskan bahwa keyakinannya tidak mempengaruhi kebijakan

politiknya, tetapi catatan mengenai ketidaksesuaian antara sikap dan perlakuan Morrison terhadap pencari suaka menunjukkan sikap Scott Morrison yang tidak konsisten. Berdasarkan faktor Inspirasi dari Pemimpin Negara Lain, Scott Morrison dan Trump saling menunjukkan kesamaan pandangan terhadap pendekatan tegas dan jelas dalam menangani masalah imigrasi.

5.2.Saran

Berdasarkan analisis faktor idiosinkratik Scott Morrison dalam kebijakan penanganan pencari suaka yang diterapkan di Australia, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan Transparansi: Disarankan agar Scott Morrison dan pemerintahnya meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam kebijakan penanganan pencari suaka. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang lebih terperinci tentang proses suaka, kondisi penahanan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pencari suaka.
2. Pengawasan Independen: Rekomendasi ini mencakup pentingnya melibatkan lembaga-lembaga pengawasan independen, baik nasional maupun internasional, untuk memantau kondisi penahanan, memeriksa perlakuan terhadap pencari suaka, dan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.
3. Mengutamakan Kemanusiaan: Disarankan agar kebijakan penanganan pencari suaka dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini melibatkan memberikan perlindungan yang memadai bagi pencari suaka, memastikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta mengurangi risiko kekerasan dan eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Migration Heritage Centre*. (2013). Dipetik Desember 25, 2022, dari 1965-1990 Australia & Asia: <https://www.migrationheritage.nsw.gov.au>
- Cambridge Dictionary*. (2020). Dipetik Desember 26, 2022, dari <https://dictionary.cambridge.org/>
- 9NEWS. (2019, Februari 17). *Government closes distance on Labor in new poll*. Dipetik Januari 15, 2023, dari 9NEWS: <https://www.9news.com.au/national/national-news-scott-morrison-asylum-seeker-people-smugglers/2d051b4d-2339-4f5f-8b0c-94aced86dbec>
- Abbott, T., & Morrison, S. (2013, Agustus 16). Abbott and Morrison unveil plan to strip asylum seekers of right of appeal. (A. N. (Australia), Pewawancara)
- ABF. (2015, Januari). *the overview of Australian Border Force*. Dipetik November 19, 2022, dari Australian Border Force: <https://www.abf.gov.au/about-us/careers/a-career-with-us/overview>
- ABH. (2022). *SENATE STANDING COMMITTEE ON LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS*. Australian Border Force.
- Action Network. (2017). *Petitions #BringThemHere*. Dipetik Maret 24, 2023, dari Action Network: <https://actionnetwork.org/petitions/bringthemhere>
- Afinotan, L. A. (2014). Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, 249-256.
- AHRC. (2006, Februari 21). *Responding to Cronulla: Rethinking Multiculturalism*. Dipetik Juni 13, 2023, dari Australian Human Rights Commission: https://humanrights-gov-au.translate.goog/about/news/speeches/responding-cronulla-rethinking-multiculturalism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Amnesty International. (2023). *Who We Are- Amnesty International*. Dipetik Mei 20, 2023, dari Amnesty International Australia:

<https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/australia/>

ASRC. (2018). *#ChangeThePolicy with us in 2018*. Dipetik Maret 24, 2023, dari Asylum Seeker Resource Centre: https://action.asrc.org.au/homecampaign_old

ASRC. (2018, Oktober 19). *#KidsOffNauru Campaign Update*. Dipetik Maret 14, 2023, dari Asylum Seeker Resource Centre: https://asrc.org.au/2018/10/19/canberra_update/

ASRC. (2019). *At What Cost?-Asylum Seeker Resource Centre*. ASRC.

ASRC. (2023). *About us- the Asylum Seeker Resource Centre (ASRC)* . Dipetik Mei 20, 2023, dari the Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) : <https://asrc.org.au/about-us/>

Asylum Insight. (2013, Mei). *EVOLUTION OF ASYLUM POLICY IN AUSTRALIA*. Dipetik Oktober 6, 2022, dari Asylum insight facts and analysis : <https://www.asyluminsight.com/evolutionofasylumpolicy>

Australian Human Rights Commission. (2023). *About- Australian Human Rights Commission*. Dipetik Mei 20, 2023, dari Australian Human Rights Commission: <https://humanrights.gov.au/about>

Australian Red Cross. (2023). *We are Red Cross*. Dipetik Mei 20, 2023, dari Australian Red Cross: <https://www.redcross.org.au/about/>

Blair, K., & Alam, O. (2018, Oktober). *PUBLIC ATTITUDES TOWARDS ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES*. Dipetik Mei 2, 2023, dari refugee research online: <https://refugeeresearchonline.org/public-attitudes-towards-asylum-seekers-and-refugees/>

Blankshain, J. D. (2019). *Foreign Policy Decision-Making*. Oxford: Oxford Bibliographies.

Brennan, F. F. (2016). Human Rights and the National Interest: the Case Study of Asylum, Migration, and National Border Protection. *Boston College International & Comparative Law Review*, 47-88.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.

- Butler, J., & Hurst, D. (2022, Februari 24). *Australia agrees 450 refugees can be resettled in New Zealand, nine years after deal first offered*. Dipetik April 1, 2023, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/24/australia-agrees-450-refugees-can-be-resettled-in-new-zealand-nine-years-after-deal-first-offered>
- Davidson, H. (2018, September 19). *'I stopped these': Scott Morrison keeps migrant boat trophy in office*. Dipetik Maret 4, 2023, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/sep/19/i-stopped-these-scott-morrison-keeps-migrant-boat-trophy-in-office>
- Department of Home Affairs. (2013). *Operation Sovereign Border (OSB)*. Dipetik Juni 5, 2022, dari Australian Government Home Affairs: osb.homeaffairs.gov.au/
- Department of Home Affairs. (2022). *SIEV 915 and the Commander Joint Agency Task Force Operation Sovereign Borders public statement*. Department of Home Affairs.
- Department of the Prime Minister and Cabinet. (1991, November 15). *Australian Honours Search Facility*. Dipetik Januari 2, 2023, dari Australian Government: <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&prev=search&u=https://honours.pmc.gov.au/honours/awards/996207>
- Evans, B. (2021, September 27). *That fella from Down Under*. Dipetik Januari 6, 2023, dari Biography: <https://insidestory.org.au/that-fella-from-down-under/>
- Gailberger, J. (2020, Desember 4). *ScoMo's tribute to late father at NSW Police graduation*. Dipetik Januari 7, 2023, dari NCA NewsWire: <https://www.news.com.au/finance/work/at-work/scomos-tribute-to-late-father-at-nsw-police-graduation/news-story/4f34685dce0cde0ae2acc6a86a72574f>
- Hidayanto, T. E. (2016). Kebijakan Australia dalam Mengatasi Illegal Immigrant di Bawah Pemerintahan PM Tony Abbott. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1-13.
- Homeaffairs. (2018, Maret 10). *People smuggler sentenced to 12 years jail*. Dipetik Mei 1, 2023, dari <https://minister.homeaffairs.gov.au/peterdutton/Pages/people-smuggler-sentenced-to-12-years-jail-.aspx>

- Hudan, R. H. (2019). Kontradiksi Operation Sovereign Borders Australia terhadap Peratifikasian Konvensi Pengungsi tahun 1951. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Hudson, V. M. (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Foreign Policy Analysis*, 2.
- Hugo, G., Tan, G., & Napitupulu, J. (2016). Indonesia as a transit country in irregular migration to Australia. 4-31.
- Iaria, M., & Nilsson, A. (2022, April 23). *John Howard praises PM Scott Morrison, while slamming teal independent candidates as 'anti-Liberal groupies'*. Dipetik April 4, 2023, dari NCA NewsWire: <https://www.news.com.au/national/nsw-act/politics/john-howard-slams-teal-candidates-as-antiliberal-groupies/news-story/bbcecc9f947235fff01c70a3bc70fdfd>
- Ibekwe, S. O. (2021). 'Preventing People from Risking Their Lives at Sea': Forced Migration and the Securitization of Asylum Seekers in Australia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-8.
- Karlsen, E. (2016, September 7). Dipetik Januari 17, 2023, dari https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/rp1617/refugeeresettlement
- Karlsen, E. (2016, Desember 2016). *Australia's offshore processing of asylum seekers in Nauru and PNG: a quick guide to statistics and resources*. Dipetik Desember 2, 2022, dari Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore
- Karlsen, E. (2016, September 7). *Refugee resettlement to Australia: what are the facts?* Dipetik Desember 17, 2023, dari Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/rp1617/refugeeresettlement
- Karp, P. (2018, November 21). *Australia refuses to sign UN migration pact, citing risks to turnbacks and detention*. Dipetik Mei 10, 2023, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/nov/21/australia-refuses-to-sign-un-migration-pact-citing-risks-to-turnbacks-and-detention>
- Kelly, C. (2019, September 23). *The shocking story of the pastor Scott Morrison considers a major influence*. Dipetik 7 Maret, 2023, dari Newdaily:

<https://thenewdaily.com.au/news/national/2019/09/23/hillsong-brian-houston-scott-morrison/>

- Kelly, S. (2021). *The Game- A Potrait of Scott Morrison*. Carlton VIC: Black Inc.
- Kemlu. (2020). *Joint Statement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia*. Jakarta: Kemlu.
- Klocker, N., & M.Dunn, K. (2003). "Who's Driving the Asylum Debate? Newspaper and Government Representations of Asylum Seekers" . 71-92.
- Koser, K. (2010). *Responding to Boat Arrivals in Australia: Time for a Reality Check*.
- Kurmelovs, R. (2015, September 8). *#RefugeesWelcome: Australians demand a softer stance*. Dipetik Maret 24, 2023, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/features/2015/9/8/refugeeswelcome-australians-demand-a-softer-stance>
- Leroy, M. (2022). *An Island Under Siege: Negative Australian Media Narratives of Asylum Seekers and the Opportunity for Counter-Discourses*. *International Journal of Postcolonial Studies*, 81-99.
- Maria, C. (2018). *Analisis Model Teori Idiosinkratik terhadap Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri John Howard (1996-2007) dalam Imigran Gelap di Australia*. *IR Binus Article*.
- Matthews, B., & Ross, L. (2010). *Research Methods A Practical Guide for the Social Sciences*. Harlow: Pearson Education Limited.
- McCabe, H. (2022, Februari 21). *Who is Scott Morrison? The Australian Prime Minister shares a rare and candid look inside his personal life*. Dipetik Maret 21, 2023, dari The Australian Women's Weekly: <https://www.nowtolove.com.au/news/local-news/who-is-scott-morrison-50827>
- McGuirk, R. (2022, April 18). *Australian leader warns of a resurgence in asylum seekers*. Dipetik Mei 20, 2023, dari AP NEWS: <https://apnews.com/article/immigration-travel-europe-australia-scott-morrison-78753a60e722cafbac8f1a3c7f7628a2>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication Inc.

- Morrison, S. (2013, Agustus 16). Tony Abbott and Scott Morrison unveil plan to strip asylum seekers of right of appeal. (A. News, Pewawancara)
- Murphy, K. (2019, September 23). *Scott Morrison praises Donald Trump's political priorities*. Dipetik Juni 3, 2023, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/sep/24/scott-morrison-praises-donald-trumps-political-priorities>
- NAA. (2018). *National Archives of Australia*. Diambil kembali dari Australia's Prime Ministers: <https://www.naa.gov.au/explore-collection/australias-prime-ministers/scott-morrison>
- National Archives of Australia. (2013). *Refugees displaced by World War II*. Dipetik November 15, 2022, dari National Archives of Australia: <https://www.naa.gov.au/explore-collection/immigration-and-citizenship/migrant-stories/refugees/refugees-displaced-world-war-ii>
- National Justice Project. (2023). *About- National Justice Project*. Dipetik Mei 20, 2023, dari National Justice Project: <https://justice.org.au/who-we-are/>
- NCCA. (2018). *Australian Churches Refugee Taskforce*. Dipetik Mei 20, 2023, dari National Council of Churches in Australia: <https://www.ncca.org.au/ncca-newsletter/march-2018-2/item/1283-australian-churches-refugee-taskforce>
- NMA. (2013). *'Tampa Affair'*. Dipetik November 22, 2023, dari National Museum of Australia: <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tampa-affair>
- NMA. (2016). *Vietnamese refugees boat arrival*. Dipetik Februari 14, 2023, dari National Museum Australia: <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/vietnamese-refugees-boat-arrival>
- Norman, J., & Healy, J. (2018, Agustus 24). *How Malcolm Turnbull was replaced as Prime Minister in less than a week*. Dipetik Februari 20, 2023, dari ABC News: https://www-abc-net-au.translate.goog/news/2018-08-23/liberal-leadership-crisis-timeline/10155746?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true
- OHCHR. (2021). *Universal Periodic Review*. OHCHR.

- Parliament of Australia. (2019, April 4). *Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee*. Dipetik Mei 18, 2022, dari Parliament of Australia: <https://parlinfo-aph.gov.au/>
- Parliament of Australia. (2022). *Hon Scott Morrison MP*. Dipetik April 1, 2023, dari Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=E3L
- Parliament of Western Australia. (2022). *About Ministers and Shadow Ministers*. Dipetik april 15, 2023, dari Parliament of Western Australia: <https://www.parliament.wa.gov.au/>
- Paul S. Gray, J. B. (2007). *The Research Imagination: an Introduction to Qualitative and Quantitative Methods*. New York: Cambridge University Press.
- Peatling, S. (2018, Agustus 24). *Scott Morrison selected as Australia's 30th Prime Minister*. Dipetik Februari 2, 2022, dari The Sydney Morning Herald: https://www-smh-com-au.translate.google.com/politics/federal/scott-morrison-selected-as-australia-s-30th-prime-minister-20180824-p4zzjz.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Petrie, C. (2021, Mei 12). *Migration Amendment (Clarifying International Obligations for Removal) Bill 2021*. Dipetik Desember 25, 2022, dari Parliament of Australia: <https://www.aph.gov.au/>
- Phillips. (2014, Februari 28). *A comparison of Coalition and Labor government asylum policies in Australia since 2001*. Dipetik Januari 21, 2023, dari Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/AsylumPolicies#_Toc381358238
- Phillips, J., & Spinks, H. (2013, Juli 23). *Parliament of Australia*. Dipetik Desember 25, 2022, dari Boat arrivals in Australia since 1976: [aph.gov.au/about_parliament/](https://www.aph.gov.au/about_parliament/)
- Post, J. M. (2003). Assessing Leaders at a Distance: The Political Personality Profile. Dalam J. M. Post, *The Psychological Assessment of Political Leaders* (hal. 69-104). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- RAC. (2023). *About- Refugee Action Coalition*. Dipetik Mei 20, 2023, dari Refugee Action Coalition: https://refugeeaction.org.au/?page_id=1920

- Razak, F. R. (2018). Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013. *Jurnal Politik Internasional*, 137-157.
- Refugee Council. (2020). *Statistics on People Seeking Asylum in the Community*. Diambil kembali dari Refugee Council of Australia: <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-community/>
- Refugee Council. (2020, Mei 6). *Timeline of refugees and Australia*. Diambil kembali dari Refugee Council of Australia: <https://www.refugeecouncil.org.au/>
- Refugee Council. (2022, Februari 24). *Statistics on boat arrivals and boat turnbacks*. Dipetik November 15, 2022, dari Refugee Council of Australia: <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/>
- Refugee Council. (2023). *About us- The Refugee Council of Australia (RCOA)*. Dipetik Mei 20, 2023, dari The Refugee Council of Australia (RCOA): <https://www.refugeecouncil.org.au/about-us/>
- Refugee Council. (2023, Mei 12). *Offshore processing statistics*. Dipetik Mei 13, 2023, dari Refugee Council of Australia: [https://www-refugeecouncil-org-au./](https://www-refugeecouncil-org-au/)
- Refugee Council of Australia. (2021, Maret 11). *Submission on Pushback Practices and Their Impact on the Human Rights of Migrants*. Dipetik Juni 20, 2022, dari Refugee Council of Australia: [refugeecouncil.org.au/submission-on-pushback-practices-and-their-impact-on-the-human-rights-of-migrants](https://www.refugeecouncil.org.au/submission-on-pushback-practices-and-their-impact-on-the-human-rights-of-migrants)
- Religions for Peace Australia. (2022, Januari 27). *Set Them Free Campaign Launch*. Dipetik Mei 20, 2023, dari Religions for Peace Australia: <https://religionsforpeaceaustralia.org.au/?p=14449>
- Santoso, I. A. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia Di Era Pemerintahan PM Tony Abbott. *Global Insight Journal*, 35-48.
- Smethurst, A. (2021). *The Accidental Prime Minister*. Hachette UK.
- Smith, C. (2012). Personality in Foreign Policy Decision-Making. *International relations journal*, 1-6.

- Smith, T. (2021, Agustus 1). *Scott Morrison gives a rare insight into his devout Christian faith in the controversial Pentecostal church and details how he has prayed on his knees every day since he was 12 - but insists he doesn't speak in tongues*. Dipetik Juni 7, 2023, dari Mail online: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9848095/Scott-Morrison-opens-Christian-faith-controversial-Pentecostal-church.html>
- Speers. (2022, Agustus 18). *Scott Morrison gave two reasons for secretly taking on five ministerial roles. But his lack of trust is what's most extraordinary*. Dipetik Juni 14, 2023, dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2022-08-18/scott-morrison-secret-ministerial-roles-lack-trust-extraordinary/101343202>
- Speers, D. (2021, Agustus 5). *Analysis: Scott Morrison wants to shift the conversation on vaccines and COVID-19. How far will he go?* Dipetik Februari 1, 2023, dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-08-05/scott-morrison-covid-vaccination-targets-doherty-modelling/100350056>
- The Australian. (2019). *Soft stance on Smugglers unchanged*. Dipetik 2023, dari The Australian : <https://www.theaustralian.com.au/business/legal-affairs/soft-stance-on-smugglers-unchanged/news-story/ca3e5c19adb019f53a719656e60da2ea>
- The Diplomat. (2016). *Australia's 'Boat People': Then and Now*. Dipetik Mei 2, 2023, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/06/australias-boat-people-then-and-now/>
- The Eastern Herald. (1986, Januari 2). *Mayor gets one of top police posts*. Dipetik Januari 3, 2023, dari The Sydney Morning Herald: <https://news.google.com/newspapers?nid=1301&dat=19860102&id=3LoyAAAIBAJ&pg=4730,7601154>
- The Guardian. (2022, Februari 15). *Defence force 'surge' to detect asylum boats in Australia's northern waters follows visa change*. Dipetik Februari 1, 2023, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/>
- Tillet, A. (2018, Desember 7). *Bubble boys: Siapa yang ada di lingkaran dalam Scott Morrison?* Dipetik Februari 4, 2023, dari Financial Review: <https://www.afr.com/policy/bubble-boys-whos-in-scott-morrisons-inner-circle-20181206-h18tg9>

UNHCR. (2001, Desember 18). *CONVENTION AND PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES*. Dipetik Juni 1, 2023, dari UNHCR: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3b66c2aa10.pdf>

UNHCR. (2021, Juli 19). *PRESS RELEASES UNHCR statement on 8 years of offshore asylum policy*. Dipetik Mei 11, 2023, dari UNHCR Australia: <https://www.unhcr.org/au/news/news-releases/unhcr-statement-8-years-offshore-asylum-policy>

UNHCR. (2022). Dipetik Juli 20, 2022, dari [unhcr.org/id/pencari-suaka](https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka)

United Nations. (2018, Juli 13). *Global compact for migration*. Dipetik Mei 2, 2023, dari UN Refugees and Migrants: <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

United Nations General Assembly. (2021). *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*. Human Right Council.

Wallenfeldt, J. (2023, Januari 9). *Scott Morrison*. Dipetik Januari 17, 2023, dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Scott-Morrison>

Waverley Council. (2019, Maret 29). *Councillors of Waverley, 1859-2009*. Dipetik Januari 4, 2023, dari Waverley web archive: http://www.waverley.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/18940/Councillors_of_Waverley_rev.pdf